



PROSIDING

Deputyship of Social Sciences and Humanities
Indonesian Institute of Sciences (IPSK-LIPI)

THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (ICSSH - 2018)

**“THE ROLE OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
TO STRENGTHEN COMMUNITY RESILIENCE
WITHIN GLOBAL NEXUS”**

Jakarta, 23-25 October 2018 | Main Auditorium LIPI

Editor: Katubi

PROSIDING

Deputyship of Social Sciences and Humanities
Indonesian Institute of Sciences (IPSK-LIPI)

THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE
ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (ICSSH - 2018)

“THE ROLE OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
TO STRENGTHEN COMMUNITY RESILIENCE
WITHIN GLOBAL NEXUS”

Jakarta, 23-25 October 2018 | Main Auditorium LIPI

Editor: Katubi

Reviewer: Tri Nuke Pudjiastuti



LIPI

Pusat Penelitian Politik
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik - LIPI)

Jakarta, 2020

PROSIDING

Deputyship of Social Sciences and Humanities - Indonesian Institute of Sciences (IPSK-LIPI)
THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (ICSSH - 2018)
"THE ROLE OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
TO STRENGTHEN COMMUNITY RESILIENCE WITHIN GLOBAL NEXUS"

Editor: Katubi

Reviewer: Tri Nuke Pudjiastuti

Desain pra-cetak: Anggih Tangkas Wibowo

Cetakan I, Februari 2020

ISBN: 978-602-5991-44-8

xxvi + 1892 hlm; 21 x 29,7 cm

STEERING COMMITTEE (SC) ICSSH - 2018

Penanggungjawab : Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A.

Pengarah:

- Prof. Dr. Firman Noor, M.A.
- Dr. Agus Eko Nugroho, M.Appl.Econ.
- Dr. Herry Jogaswara, MA
- Dr. Sri Sunarti Purwaningsih, M.A.
- Dr. Ganewati Wuryandari, M.A.

ORGANIZING COMMITTEE (OC) ICSSH - 2018

Ketua : Dr. Katubi, M.Hum.

Sekretaris:

- Khanisa S.IP., M.A.
- Rizki Indra Maulana, S.H.
- Puji Hastuti, S.Sos.

Bendahara:

- Miranthi, A.Md.
- Suryani Made Subaliati, M.Si.

Anggota:

- Anggy Denok Sukmawati, M.A.
- Jalu Lintang Yogiswara Anuraga, S.Ant.
- Anggi Afriansyah, M.Si.
- Hidayatullah Rabbani, S.Hum.
- Anggih Tangkas Wibowo, S.T., MMSi.
- Adiyatnika, A.Md.
- Dimas Sony Dewantara, S. Kom.
- Siska Kusumawardani, S.E.
- Dwi Untari, M.I.Kom
- Fatmawati Fitri Mulyadi, S.Kom
- Rio Novandra, S.E.
- Restu Riandini, A.Md.
- Ela Nopia Ami, S.Ikom.



Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Politik,

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik-LIPI)

Gedung Widya Graha LIPI, Lt. III & XI

Jl. Jend. Gatot Subroto KAV-10, Jakarta 12710 - INDONESIA

Tlp. / fax : 021 - 520.7118 | Website: www.politik.lipi.go.id

Twitter: @PolitikLIPI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya Prosiding Kegiatan seminar *International Conference of Social Sciences and Humanities 2018* Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI).

Prosiding ini merupakan laporan kegiatan seminar *International Conference of Social Sciences and Humanities 2018*. Seminar ICSSH 2018 ini diikuti oleh peneliti di kedeputian bidang IPSK LIPI, yakni dari Pusat Penelitian Politik (P2P), Pusat Penelitian Kependudukan (P2K), Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK), Pusat Penelitian Ekonomi (P2E), dan Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR).

Kegiatan seminar ini juga diikuti oleh akademisi, peneliti, dosen, pengajar, mahasiswa, pengelola jurnal dan berbagai macam profesi lainnya. Para peserta juga diikuti oleh berbagai daerah di Indonesia dan juga menghadirkan pembicara dari luar negeri. Seminar ICSSH ini dilakukan rutin setiap dua (2) tahun sekali. Penyelenggaraan seminar ini untuk yang kedua kali, sebelumnya pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016 yang bertempat di LIPI Jakarta.

Tema kegiatan ICSSH 2018 ini “Peran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan untuk Memperkuat Ketahanan Sosial dalam Keterkaitan Global (*The Role of Social Sciences and Humanities to Strengthening Resilient Within Global Nexus*)”. Ketujuh panel dan mix panel, masing-masing memiliki isu yang beragam dan beberapa isu menjadi sasaran bagi penulis antusias untuk mengikuti kegiatan seminar ICSSH 2018 ini.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kedeputian Bidang IPSK LIPI untuk memfasilitasi para peneliti bidang IPSK LIPI untuk mengikuti seminar internasional yang diadakan di lingkungan kedeputian bidang IPSK LIPI dengan bentuk kegiatan seminar internasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas para peneliti dalam rangka membangun dan memperluas jaringan internasional, dan sebagai ajang promosi institusi LIPI di kancah internasional.

Kami mengharapkan prosiding kegiatan seminar *International Conference of Social Sciences and Humanities 2018* ini dapat bermanfaat dan akan terus berlanjut tidak hanya bagi peneliti tetapi berbagai macam profesi lainnya sehingga terjadi pemerataan dalam kesempatan meningkatkan kapasitas para peneliti di kedeputian bidang IPSK LIPI.

Output artikel/tulisan dari prosiding ini diharapkan dapat dimasukkan kedalam jurnal-jurnal yang dikelola oleh Kedeputian IPSK-LIPI maupun sacker dibawahnya. Masing-masing panel yang

KATA PENGANTAR

dikuti oleh peserta, sudah direkomendasikan bila memiliki kualitas yang baik, maka dapat dilanjutkan untuk diterbitkan sebagai artikel jurnal. Prosiding ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pengelola kegiatan seminar penguatan internasional dalam rangka mewujudkan tata kelola institusi yang efektif, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari perwujudan reformasi birokrasi yang nyata dan kredibel.

Jakarta, Desember 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii - iv
Kerangka Acuan Kerja (KAK)	v - viii
Daftar Isi	ix - xxvi

PANEL 1 : Masyarakat Pinggiran (eksklusi sosial) – Marginalized Societies (PI)

MOBILITAS PENDUDUK LOKAL DI PERBATASAN NEGARA: NEGOSIASI BATAS NEGARA MASYARAKAT DI HULU SEMBAKUNG	1 - 18
---	--------

Puji Hastuti (pujisht@gmail.com), *Dian Wahyu Utami* (dian.wahyu.dwu@gmail.com)
Pusat Penelitian Kependudukan (P2K) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

WARISAN KOLONIAL DAN MARGINALISASI ORANG LOLODA DI PANTAI BARAT HALMAHERA	19 - 34
--	---------

Abd. Rahman

Mahasiswa Doktorat Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya-Universitas Indonesia,
Depok & Dosen Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Khairun, Ternate.
Email: randySeman@ymail.com

RUANG PUBLIK TROTOAR DAN EKSISTENSI FURNITUR KOTA: KONTESTASI ANTARA PEMKOT DAN KELOMPOK MARJINAL KOTA	35 - 50
---	---------

S. Aminah

Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga. Email: ami_unair@yahoo.com,
siti.aminah@fisip.unair.ac.id

TAFSIR SOSIAL ATAS BENCANA BANJIR PADA KOMUNITAS TEPI HUTAN	51 - 64
---	---------

Lutfi Amiruddin dan Yogi E. C. Farobi

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Dapat dihubungi di
amiruddin.lutfi@ub.ac.id.

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Dapat dihubungi di
yogiccf@gmail.com.

MODEL OF SYNERGY IN COMMUNITY EMPOWERMENT (STUDY ON TALANG MAMAK CUSTOMARY COMMUNITY IN INDRAGIRI HULU REGENCY)	65 - 80
--	---------

Auradian Marta and Leo Agustino

Student of Doctoral Program of Political Science UNPAD and Lecturer at Universitas Rian, email
auradian_unri@yahoo.com

Senior Lecturer at Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, email leoagustino@gmail.com

DAFTAR ISI

KEBANGKITAN SASTRA QUEER DI INDONESIA "PERLAWANAN IDEOLOGIS
KAUM LGBT MELALUI KARYA SASTRA" 81 - 94

Deny Satrio Aji

denysatrioaji94@gmail.com

KEARIFAN LOKAL DALAM PROYEK PENAMBANGAN 95 - 112

Derita Prapti Rahayu, Esmi Warassih, Sulaiman, Elfi Indra

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Jl. Kampus UBB, Bangka, Indonesia, irha82017@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jl. Sudarto SH, No. 1, Semarang, Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang No. 1, Banda Aceh, 23111, Indonesia,
sulaiman.fh@unsyiah.ac.id

URBAN KAMPUNG VS NEW TOWN: SPATIAL CONTESTATION IN JAKARTA
SUBURBS A CASE STUDY IN KARAWACI-SERPONG AREA, TANGERANG 113 - 130

Dwiyanti Kusumaningrum

Peneliti, Pusat Penelitian Kependudukan, LIPI, email: dwiyanti.kusumaningrum@gmail.com

FAKTOR KESEJAHTERAAN KELUARGA KORBAN BANJIR BANDANG
DI GARUT PADA SEPTEMBER 2016 131 - 142

Euis Sunarti

Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Jl. Lingkar Kampus IPB Dramaga, Bogor, Email: euissunarti@apps.ipb.ac.id, euismn@gmail.com

DUA MAKAM GAJAH MADA DI LOMBOK:
SEJARAH PUBLIK MASYARAKAT SASAK 143 - 156

Farida Jaeka

Ilmu Susastra Peminatan Cultural Studies, FIB, Universitas Indonesia, email: faridajaeka99@gmail.com

IDENTITAS DAN KONFORMITAS PELAJAR KAWRUH JIWA
(Sebuah Studi di Komunitas Penganut Ajaran Ki Ageng Suryomentaram di Dusun Gombang,
Beringin, Kabupaten Semarang) 157 - 168

Fibry Jati Nugroho

Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, email: fibryjatinugroho@gmail.com

SENI UNTUK DAMAI: UPAYA REKONSILIASI AKAR RUMPUT
PASCA TRAGEDI 1965 169 - 182

Ganesh Cintika Putri

Institute of International Studies sebagai staf advokasi

NARASI TENTANG KEBUDAYAAN BADUY DI ANJUNGAN PROVINSI BANTEN,
MUSEUM NEGERI PROVINSI BANTEN, DAN MUSEUM SITUS
KEPURBAKALAN BANTEN LAMA 183 - 196

Herman Hendrik

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, email: herman.hendrik2003@gmail.com

RUANG PUBLIK TROTOAR DAN EKSISTENSI FURNITUR KOTA:
KONTESTASI ANTARA PEMKOT DAN KELOMPOK MARJINAL KOTA

PUBLIC SPACE OF SIDEWALK AND EXSISTENCE OF CITY FURNITURE:
CONTESTATION BETWEEN URBAN GOVERNMENT AND URBAN
MARGINAZIED GROUPS

S. Aminah

Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga

ami_unair@yahoo.com

siti.aminah@fisip.unair.ac.id

Abstract

This article discusses the rapid political changes in urban areas in Surabaya, especially the construction of public sidewalk spaces which are the place of contestation between the city government and marginalized groups in urban areas. This discussion focuses on street vendors (Pedagang Kaki Lima/PKL) as a marginalized groups in urban area and furniturization as an entry point for broader questions about the contestation of public space. Research uses qualitative methods that explore the interests of city government and street vendors competing for sidewalks. It also uses direct observation and documentation analysis. The contestation of the city government and PKL is a practice of spatial political. Analysis of problems in controlling public sidewalk spaces framed in policies on sidewalk furniturization. This study offers a solution and suggests recommendations for the policy makers, sidewalk spatial planning policy that does not exclude street vendors or PKL especially. Public spatial planning policies are synergized with the real needs of marginalized groups in urban areas, especially street vendors. The sidewalk furniturization policy is not to strengthen practices of city's economic liberalization.

Keywords: *street furniture, marginalized gorups, street vendors (PKL), practice of spatial political, city's economics liberalization.*

Abstraksi

Artikel ini membahas tentang perubahan politik yang cepat di perkotaan di Surabaya, terutama pembangunan ruang publik trotoar yang menjadi ajang kontestasi antara pemerintah kota dan kelompok marjinal kota. Pembahasan ini fokus pada PKL sebagai kelompok marjinal kota dan furniturisasi sebagai titik masuk untuk pertanyaan yang lebih luas tentang kontestasi ruang publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang mengeksplorasi kepentingan Pemkot dan PKL yang bersaing atas trotoar. Selain itu juga menggunakan pengamatan langsung dan analisis dokumentasi. Kontestasi pemerintah dan PKL merupakan praktik politik spasial. Analisis masalah pada pengendalian ruang publik trotoar yang dibingkai dalam kebijakan furniturisasi trotoar. Kajian ini menawarkan solusi dan menyarankan rekomendasi kebijakan penataan ruang trotoar yang tidak mengeksklusi PKL. Kebijakan penataan ruang publik trotoar disinergikan dengan kebutuhan riil masyarakat marjinal terutama PKL. Kebijakan furniturisasi trotoar bukan untuk memperkuat praktik liberalisasi ekonomi kota.

Kata kunci: *furnitur trotoar, kelompok marjinal kota, praktik tata ruang, PKL, liberalisasi ekonomi kota.*

Pendahuluan

Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur menimbulkan efek negatif yang kurang konstruktif bagi kota dan penduduknya. Pembangunan infrastruktur itu berkaitan dengan serbuan penduduk dari perdesaan ke perkotaan. Meningkatnya jumlah penduduk kota ini akibat urbanisasi. Dunia melihat tingkat urbanisasi yang tinggi dan mempercepat migrasi. Tahun 2007 adalah tahun pertama di mana lebih banyak orang tinggal di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan. Tahun 2050 akan ada sekitar 66 persen dari populasi dunia tinggal di area perkotaan. Ini disebabkan meningkatnya jumlah populasi pada tahun 2050 yang diperkirakan mencapai 9,2 miliar. Pada saat itu populasi daerah perkotaan mungkin akan menjadi sekitar 6,4 miliar, atau 70 persen dari populasi dunia. Konsekuensi kedua dari proses urbanisasi ini adalah bahwa pola global kemiskinan, informalitas, dan eksklusi dunia akan secara pasti memperoleh wajah perkotaan. (<https://www.unfpa.org/world-population-trends>).

Praktik-praktik spasial di ruang publik perkotaan selalu menmanifestasikan adanya pertentangan antara pemerintah dan non pemerintah (Nagati & Stryke, 2016). Pertentangan kepentingan semakin kuat menggejala di kota-kota besar yang sudah menjalankan model pembangunan ala liberal. Trotoar sudah dilengkapi dengan fitur endemis dan hal ini semakin memperkuat identitas ruang publik sebagai ruang ketimpangan, eksklusi sosial, segregasi, kekerasan dan ketidakamanan (Kruijt & Koonings (eds.), 2009). Pesatnya pertumbuhan dan penambahan penduduk di kota besar telah menyebabkan terjadinya patologi perkotaan. Patologi itu berbentuk *disjuncture* sistematis antara struktur peluang untuk mata pencaharian, penyediaan layanan, keamanan dan perencanaan kota secara keseluruhan dan regulasi. Selain itu, ruang kota-kota besar juga tidak lagi ideal dari ukuran dan komposisi populasinya. Kota-kota besar dengan penduduk yang terus bertambah akan mengalami patologi perkotaan. Konsentrasi segmen kaum miskin yang terekklusi itu ada di kota-kota besar negara berkembang.

Kelompok miskin ini menjadi kelompok marjinal sebagai konsekuensi dari proses urbanisasi, informalisasi, kekerasan ekonomi yang telah terjadi ketika mereka belum berurbanisasi ke kota. Fenomena ini terjadi di seluruh kawasan dunia. Fenomena kemiskinan perkotaan dan eksklusi terjadi dari tahun 1970-an hingga saat ini di hampir semua belahan dunia. Fenomena itu muncul sebagai efek dari peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja, teknologi baru, deindustrialisasi, dan liberalisasi ekonomi telah menghasilkan energi baru dan peluang ekonomi. Mereka juga telah menimbulkan masalah sosial yang berat bagi mereka yang tidak mampu bersaing dalam situasi baru, karena mereka tidak memiliki akses ke sumberdaya, keterampilan, dan hak. Banyak sektor ekonomi yang berada kawasan industri, belum mampu membuat transisi ke ekonomi baru dengan masuknya generasi baru ke pasar kerja dan kedatangan para migran baru telah menciptakan ketegangan dan tantangan baru bagi integrasi sosial (Madanipour, 2004). Dalam artikelnya yang berjudul "Marginal public spaces in European cities", Madanipour (2004) menyebutkan bahwa semua kota besar di Eropa ada kelompok yang paling rentan, yaitu orang miskin, orang tua, anak-anak, perempuan, dan etnis minoritas telah terpapar pada risiko pengucilan sosial (eksklusi sosial). Pengucilan ini akan menjadi fenomena global di masa depan dan perlu penanganan dari pemerintah untuk mengatasi dampak buruk yang ditimbulkannya.

Kota-kota besar di Indonesia menghadapi problema yang diprediksi oleh Madanipour itu, tak terkecuali Surabaya sebagai kota besar turut dalam arus fenomena *urban megacity*. Kota besar

modern dalam gagasan Lefebvre adalah kota yang ramah dengan semua penghuninya. Gagasan Lefebvre yang tertuang dalam karyanya *'The Right to The City'* tak lebih dari sebuah gagasan yang bertujuan mengembalikan eksistensi kota yang sudah berubah menjadi arena produksi kapitalis. Transformasi kota Surabaya yang begitu cepat tidak diikuti dengan kepekaan masyarakat untuk menggarap lingkungan yang berubah. Berjalannya logika pasar liberal dan neoliberal hegemonik didukung oleh legalitas dan tindakan negara. Berdirinya mal/plasa, utilitas publik seperti apartemen, kondominium dan ruang-ruang publik yang menyatu dalam mal/plasa adalah hasil dari tindakan negara yang bernegosiasi dan berkolaborasi dengan swasta. Ruang-ruang sudah menjadi milik pribadi (swasta/perusahaan) yang terus menerus memproduksi keuntungan dan mengalahkan hak warga miskin kota serta masyarakat kelas menengah bawah lainnya.

Pembangunan infrastruktur sosial dan publik secara besar-besaran termasuk perluasan ruang publik trotoar menjadi penunjuk dari kota besar modern. Eksistensi dan fungsi ruang publik sudah banyak berubah. Ruang publik bukan lagi ruang demokrasi, melainkan pusat perdagangan dan konsumsi pribadi, dan bahkan pengawasan dan kontrol polisi (Low & Smith, 2006). Ruang trotoar di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Ruang trotoar dibangun untuk membuat para pejalan kaki nyaman dan aman, tetapi juga untuk meningkatkan daya dukung kota. Pemkot Surabaya membangun trotoar yang berada di jalan utama, sentra bisnis maupun kantor pemerintahan serta kantor pelayanan publik. Sudah ada 60 pedestrian yang memiliki jalur untuk penyandang difabel. Diantaranya, Jalan Raya Darmo, Rajawali, Urip Sumoharjo (arah Darmo), Raya Gubeng, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani (*frontage road* sisi timur) serta Jalan Gemblongan. Kawasan pedestrian pembangunannya dirintis sejak kepemimpinan pasangan Bambang DH-Arif Afandi sudah memperhatikan kepentingan kaum difabel dengan memberikan jalur khusus (<https://news.detik.com/.../selain-luas-dan-nyaman-trotoar-di-surabaya-juga-ramah-bag...>).

Makalah ini adalah memberikan perhatian pada ruang publik trotoar sekaligus sebagai tanggapan dan pelengkap terhadap penjelasan dalam literatur ilmu sosial yang belum mencukupi untuk menjelaskan furniturisasi ruang publik trotoar. Kebijakan pemerintah Kota Surabaya melakukan furniturisasi bukan sekadar untuk menciptakan keindahan kota, melainkan sebagai instrumen politik kekerasan politik. Furniturisasi tidak hanya membuat pejalan kaki tidak nyaman karena banyak sekali rintangan dalam trotoar itu. Artinya, furniturisasi ruang trotoar adalah kebijakan Pemkot yang bertujuan membatasi kelompok marjinal untuk tidak memanfaatkan trotoar. Kebijakan ini dituangkan dalam regulasi yaitu Peraturan Daerah No.9 Tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya dan furniturisasi.

Dengan Perda No.9 Tahun 2014 sebagai indikasi dari berubahnya spasial kota dan ruang publik yang beralih fungsi dan akhirnya ruang menjadi area yang rawan konflik. Hasilnya terukur tak terhingga pada bentuk spasial kota-kota kita, yang semakin terdiri dari fragmen yang diperkaya, komunitas yang terjaga keamanannya dan ruang publik yang diprivatisasi disimpan di bawah pengawasan konstan. Regulasi itu berwajah ganda. Pertama, meningkatkan daya dukung fungsi trotoar. Kedua, mengeksklusi dan mendegradasi PKL sebagai kelompok marjinal kota yang memanfaatkan trotoar. Furniturisasi telah menimbulkan efek sosial politik nyata. Eksklusi sosial atau pengucilan secara sosial adalah proses multidimensi dan itu membutuhkan tanggapan multidimensi, yang meliputi penyediaan ruang publik. Ruang publik yang dikelola dengan baik dan berkualitas baik dapat memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi integrasi sosial

PANEL 1

dari penduduk yang kurang beruntung. Ruang publik yang dimanfaatkan PKL penting dalam melayani kebutuhan sehari-hari rumah tangga, menyediakan tempat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain, dan mengembangkan nilai simbolik yang dapat menciptakan rasa keterikatan emosional dengan lingkungan dan juga kota (Van Deusen Jr, 2002).

Menempatkan kembali trotoar sebagai ruang publik yang didukung oleh furniturisasi perlu dievaluasi kembali. Furniturisasi tidak hanya merugikan para pejalan kaki. Karena furniturisasi menjadi penghalang bagi kenyamanan berjalan, tetapi juga furniturisasi telah membawa pada ranah kontestasi antara PKL dan pemkot yang bermaksud mengendalikan bahkan mensterilisasi trotoar sesuai dengan fungsi ideal normatifnya bukan empirisnya.

Ruang Publik Trotoar dan Kelompok Marjinal (PKL)

Trotoar sebagai ruang publik dibuat melalui serangkaian proses politik termasuk pengamanan terhadap trotoar itu. Perancangan ruang publik secara ideal mengintegrasikan kehidupan publik. Bagi Carr, Francis, Rivlin, Stone (1992) ada tiga dimensi manusia yang harus memandu proses desain dan manajemen ruang publik: kebutuhan penting pengguna, hak spasial mereka, dan makna yang mereka cari. Pengembangan ketiga dimensi ini melalui pemahaman detil dan baik tentang sejarah kehidupan publik dan ruang publik. Sehingga ruang publik itu menawarkan pendekatan inovatif untuk mengadaptasi dimensi ke konteks sosial dan lingkungan yang unik dari setiap program pembangunan ruang publik termasuk furniturisasi yang dilakukan pemerintah kota. Ruang publik merupakan unsur penting bagi keberlanjutan kota untuk politik, sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat dan alasan keanekaragaman (Banerjee, 2001). Namun, itu tren dominan yang diamati oleh banyak orang adalah salah satunya penyusutan daripada perluasan publik. Ruang publik memiliki dimensi politik tetapi bukan sebagai ruang demokrasi. Ruang publik sebagai pusat perdagangan dan konsumsi pribadi dan bahkan pengawasan dan kontrol polisi ((Low dan Smith (eds.), 2006).

Proses pembangunan dan pengembangan ruang publik trotoar sudah menerapkan teknologi pengawasan. Hal ini tercermin dari adanya konflik antara aktor politik dan ekonomi di ruang publik, di mana keduanya mencoba untuk membawa ruang publik ke dalam lingkup pengaruh mereka (Brown dan MacKie, 2017; Rekhviashvili, 2015). Aktor politik, yaitu pemerintah dan aktor ekonomi yang berada dalam posisi marjinal adalah PKL berhadapan dalam kesehariannya. Van Deusen Jr. (2002) mencatat bahwa ruang publik selalu menjadi ruang konflik. Karena ini adalah tempat perjuangan siapa yang mengontrol dan siapa yang memiliki akses terhadapnya, siapa yang menentukan dan membuat regulasi, dan bagaimana ia direproduksi. Kedua, meskipun tampaknya paradoksal, ruang publik selalu merupakan ruang eksklusif, di mana akses tertentu diizinkan atau ditolerir. Ketiga, kita dapat mengukur sejauh mana ruang publik menumbuhkan representasi politik dan pada tingkat apa orang dapat terlihat menentang hubungan sosial, memprotes ketidakadilan dan menggunakan ruang untuk penggunaan mereka sendiri. Oleh karena itu, dan terakhir, kualitas-kualitas ruang publik ini mengukur tingkat keadilan sosial setiap masyarakat; mereka mengukur spektrum hak di setiap rangkaian hubungan sosial, serta bagaimana pengaturan dan pengendalian tindakan yang berhubungan dengan distribusi sumber daya, hak dan akses ke ruang publik yang tidak merata, berkontribusi pada penindasan orang.

Aspek-aspek ruang publik ini muncul dari praktik orang-orang di ruang publik serta dari para perancang yang menciptakannya (Van Deusen Jr., 2002). Peran perencana dalam penyediaan ruang

publik serta ruang publik sebagai tempat perjuangan adalah penting ketika harus memahami alasan dibalik perkembangan trotoar yang dipenuhi dengan perabot dalam studi kasus ini. Tekanan ekonomi dan politik merupakan kenyataan selalu hadir untuk para perencana ruang publik trotoar di Surabaya. Perjuangan yang terjadi di ruang publik trotoar antara PKL dan pemkot. PKL untuk memanfaatkan, sementara pemkot untuk mengendalikan dan menertibkan PKL di trotoar itu.

Furniturisasi ruang publik trotoar menjadi trend di banyak kota-kota besar dunia. Di Italia misalnya, ruang publik trotoar diisi dengan berbagai dekorasi perkotaan dan furniturisasi. Furnitur perkotaan mengacu pada perabot yang ditemukan di ruang publik atau di lingkungan perkotaan, misalnya bangku taman, pot-pot bunga, dan lainnya. perabotan, digunakan oleh otoritas sipil untuk mengecualikan para tunawisma dari penggunaan publik ruang. Konsep furnitur kota mencakup barang-barang dan perangkat yang dipasang di ruang perkotaan, sehingga di jalan-jalan dan di taman-taman, untuk berbagai tujuan, seperti bangku, hambatan keamanan, kotak pos, kotak telepon, tiang lampu, lalu lintas lampu, sinyal lalu lintas, pemberhentian bus, toilet umum, tempat sampah (Bergamaschi, Castrignanò & De Rubertis, 2014).

Furnitur perkotaan memungkinkan orang untuk menikmati pengalaman yang lebih nyaman di jalan-jalan, jalur, taman, taman, dan area umum lainnya. Itu bisa meningkatkan kualitas hidup bagi penduduk kota. Misalnya, elemen rambu dan lampu jalan selain sebagai penunjuk arah menggunakan panah untuk menunjukkan tujuan-tujuan penting dengan jelas. Kelompok lain adalah iluminasi, selain fungsi utamanya menerangi ruang terbuka di malam hari, lampu-lampu penerangan jalan juga berfungsi untuk memberikan rasa aman yang lebih besar bagi pejalan kaki serta menyoroti jalur atau area tertentu di dalam ruang.

Pemanfaat ruang trotoar itu beragam. Sebagian besar dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima (PKL) dan kelompok marjinal lain. Pedagang kaki lima (PKL) di negara-negara berkembang Asia Tenggara memainkan peran yang signifikan, tetapi sering tidak dihargai, baik dalam semangat ruang publik maupun ekonomi informal. Sehingga PKL tunduk pada penertiban atau pembersihan dari trotoar dan wilayah lain yang diperebutkan (Recio and Gomez, 2013). Hal ini adalah bentuk kegagalan dari pemerintah kota dalam memahami kehadiran dan kebutuhan PKL sebagai bagian dari kelompok marjinal kota.

Bentuk-bentuk dekorasi dan furniturisasi itu untuk menjauhkan tuna wisma memanfaatkan ruang trotoar itu. Di Indonesia, furniturisasi memiliki banyak tujuan dan tujuan itu merepresentasi kepentingan dari para perencana ruang publik kota. Artinya setiap perabot atau furnitur yang ada di trotoar memiliki fungsinya masing-masing. Perabot jalan (*street furniture* atau infrastruktur pendukung ruang publik yang ada di sepanjang sisi jalan) yang tak hanya mempercantik trotoar, tetapi juga memiliki manfaat. menyediakan fasilitas penting untuk pejalan kaki dengan menambahkan fungsionalitas dan vitalitas ke dunia pejalan kaki. Mereka mengumumkan bahwa pejalan kaki diterima dan bahwa jalanan adalah tempat yang nyaman untuk ditinggali. Fasilitas ini menyediakan layanan fungsional untuk pejalan kaki dan memberikan detail visual dan minat. Furnitur itu ditempatkan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas ruang.

Produk furnitur perkotaan tambahan termasuk pemasangan papan iklan, bangku taman, tempat sampah, papan informasi, telepon umum, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bola-bola (*bollards*), pot-pot bunga/tanaman, dan lainnya. <https://www.neko-europe.com/what-is-urban-furniture/>. Fasilitas pejalan kaki harus dianggap sebagai elemen dari jalan, seperti sinyal lalu lintas dan papan nama atau rambu lalu lintas. Peningkatan vitalitas jalan

telah ditunjukkan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan publik. Singkatnya, ada peran dari aparat penegak ketertiban yang menjaga trotoar (Satpol PP) untuk tidak disalahgunakan oleh PKL.

Dari furnitur-furnitur yang mempunyai fungsi pendukung maupun pengganggu ada dalam sebuah ruang yang sama (trotoar). Contoh: *bollards* itu sebenarnya sebagai pembatas jalan dan trotoar sehingga keberadaannya menunjang keamanan dan kenyamanan para pejalan kaki yang melintasi trotoar. Bollard sepanjang tepian trotoar akan menghambat kendaraan bermotor memasuki kawasan khusus pejalan kaki itu, baik untuk sekadar parkir atau melintasinya. Pengadaan perabot jalan disesuaikan dengan fungsi masing-masing kawasan. Dibalik fungsi estetika dan kenyamanan dari furnitur kota, ada kecenderungan furnitur itu telah memicu praktik kekerasan di kota. Sebagai kelompok marjinal, tidak memiliki kuasa (*power*) untuk melawan, kecuali hanya bertahan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Asesoris kota berfungsi sebagai penolak atau penghalang terhadap orang yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Melalui bangku-bangku ini kota-kota mengontrol dan mengatur secara tidak langsung penggunaan yang dibuat dari kota-kota yang sama. Itu semacam arsitektur disiplin, yang tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat umum dari yang tidak diinginkan perilaku orang yang tidak diinginkan (Dan Lockton, 2011). Secara khusus, kontrol dimasukkan ke dalam objek dan memaksa individu untuk menyesuaikan diri penggunaannya yang sah. Seperti itu proyek ditujukan untuk menganugerahkan citra positif, inovatif, dan diinginkan kepada kota yang harus mampu menghadapi persaingan yang tumbuh di antara kota-kota lain sebagai ruang baru bisnis, layanan, dan konsumen. Furnitur perkotaan adalah kebijakan pemerintah kota yang berfungsi sebagai strategi kontrol untuk keamanan dan kenyamanan pengguna trotoar (Doherty et al. 2008). Terutama adalah trotoar sebagai ruang publik yang berorientasi pada konsumsi, maka trotoar itu menjadi pusat perhatian pemerintah yang ditertibkan, dikendalikan dan dilindungi.

Ruang trotoar yang mendekati fungsi idealnya merupakan simbol identitas kota dan dianggap sebagai salah satu yang paling banyak tempat-tempat karakteristik arsitektur pasca-modern seperti yang ada di beberapa kota besar Indonesia saat ini. Karakteristik atau identitas ruang-ruang kota itu menjadi penting dalam konteks menciptakan daya saing, keindahan, keamanan, kegunaan dari kota itu. Karena itu, kontrol atas ruang publik merupakan strategi fundamental bagi kekuatan ekonomi neoliberalisme (Low, Smith 2006). Dalam pengertian ini, kota wirausaha atau neoliberal adalah kota yang terkontrol dan eksklusif.

Kelompok marjinal memanfaatkan trotoar. Kelompok ini adalah kelompok yang mengalami marjinalisasi. Marjinalisasi adalah proses yang melaluinya anggota dari beberapa segmen masyarakat menemukan diri mereka keluar dari arus utama berdasarkan keanggotaan mereka secara sosial kelompok yang berarti. Kelompok dapat menjadi terpinggirkan berdasarkan berbagai karakteristik seperti agama, kelas sosial, etnis, karakteristik ras yang terlihat, jenis kelamin, usia, dan orientasi seksual. Status sosial orang-orang terkait dengan karakteristik ini berdasarkan interpretasi makna mereka daripada pada setiap bawaan kualitas yang mungkin mereka miliki (Given (ed.). 2008).

Dengan demikian, kelompok marjinal merupakan populasi yang terpinggirkan. Kelompok masyarakat ini adalah orang-orang yang dikecualikan dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Contoh populasi yang terpinggirkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, kelompok yang dikecualikan karena ras, agama, kelompok politik atau budaya, usia, jenis kelamin, atau status keuangan. Sejauh mana populasi semacam itu terpinggirkan, bagaimanapun, adalah konteks yang

spesifik dan bergantung pada organisasi budaya dari situs sosial yang bersangkutan. Mengakui populasi terpinggirkan dalam penelitian harus melibatkan pengakuan hubungan kekuasaan yang tidak setara antar kelompok dalam masyarakat. Dalam penelitian ini kelompok marginal diidentifikasi pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan tereksklusi secara sosial, ekonomi, dan politik. Kelompok itu menunjuk pada pedagang kaki lima (PKL).

Metode

Metode kualitatif diterapkan untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang ruang trotoar sudah berubah menjadi ruang kontestatif antara pemerintah dan PKL sebagai bagian dari masyarakat marginal kota. Surabaya menjadi lokus penelitian karena Pemkot Surabaya terus bergiat menata pemanfaatan ruang trotoar untuk menambah daya dukung keindahan ruang terbuka kota. Fokus studi ini pada ruang trotoar kota. Trotoar dilebarkan tetapi pemanfaatannya dibatasi. Pembatasan itu bukan semata-mata untuk mencegah pencaplokan ruang dari para PKL, melainkan untuk menggiring ekonomi informal menjadi ekonomi pasar (kapitalis). Trotoar sering diprotes oleh kelompok marginal dan menjadi tempat berinteraksi sehari-hari antarwarga masyarakat dengan PKL yang acap tumpang tindih. Metode kualitatif diterapkan untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang ruang trotoar menjadi kontestatif. Penyingkiran PKL dari ruang trotoar menjadi ruang yang tidak netral.

Tujuan studi ini adalah mengeksplorasi dan mencabar teori ruang publik kota. Ruang-ruang publik tidak lagi memungkinkan orang-orang untuk bertemu dan ini telah mengubah ruang publik tidak netral dalam perencanaan dan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam konteks seluruh komunitas yang ada. Observasi dilakukan dalam tiga jenis ruang publik: lingkungan perumahan, ruang terbuka hijau dan ruang pusat kota, yang mana dianggap sebagai perwakilan dari ruang publik kota secara keseluruhan. Observasi dilakukan sepanjang hari dari jam 6 pagi sampai jam 17 sore. Metode penelitiannya sangat partisipatif, dan pengamatan berkontribusi dan menginformasikan analisis data. Dalam proses penelitian, saya mengambil foto dari ruang trotoar yang ada PKL dan yang tidak ada PKL. Kemudian menetapkan alat untuk mengumpulkan data yang relevan untuk tujuan penelitian.

Tujuan studi ini adalah mengeksplorasi dan mencabar teori ruang publik kota dan kontestasi kelompok marginal kota dengan pemerintah kota. Dengan menggunakan teori ruang publik dan perspektif politik tata ruang, kajian ini sampai pada suatu kesimpulan bahwa furnitur yang berada di ruang trotoar berfungsi sebagai bentuk dari politik eksklusi dan kekerasan politik pemerintah untuk mengurangi penyalahgunaan trotoar kelompok marginal kota (PKL).

Trotoar dalam realitas memiliki dua fungsi. Pertama adalah sebagai ruang kontestasi antaraktor, yang melibatkan Pemkot dan kelompok masyarakat marginal. Kedua sebagai ruang dari kelompok marginal kota mencari nafkah. Karena itu observasi dilakukan pada dua kategori area, yaitu: pertama trotoar yang berada di jalan raya utama (kawasan elite) yang menjadi pusat kota dan jalan yang bukan menjadi pusat kota, yaitu: Jl. Tunjungan, Jl. Gembongan, Jl. Basuki Rakhmad, Jl. Pemuda, Jl. Dr. Soetomo, Jl. Raya Darmo, Jl. Panglima Sudirman. Kedua, trotoar yang berada di kawasan yang menjadi pusat fasilitas publik rumah sakit dan fasilitas pendidikan (Universitas Airlangga, kawasan Jl. Ngagel dan Jl. Raya Kertajaya dan Jl. Dharmahasada).

Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan pelaku PKL dan perangkat Satpol PP serta observasi saat ada operasi penertiban yang dilakukan hampir secara rutin pada hari

PANEL 1

Selasa pagi, mulai pukul 6 sampai 9. Wawancara berlangsung dalam serangkaian tiga fase. Pertama adalah mencari informasi tentang latarbelakang informan sebagai PKL. Informan-informan ini dipilih kemudian diwawancarai dengan bebas tentang asal mula mereka berjualan di trotoar, penggusuran, melawan aparat Satpol PP dan strategi bertahan tetap menjadi PKL dengan menciptakan inovasi teknologi untuk memudahkan ruang gerak menyingkir dari area trotoar jika ada operasi penertiban dari pemkot (dengan menggunakan becak, sepeda motor, dan sepeda angin). Kedua, memilih literatur yang relevan dan mutakhir dan hasil studi terdahulu tentang ruang publik trotoar dari perspektif sosio dan politico spatial. Ketiga mendalami kasus furniturisasi trotoar dalam pandangan PKL dan masyarakat pengguna trotoar. Studi literatur digunakan untuk melihat perkembangan akademik atas konsep ruang publik dan kelompok marjinal kota.

Selanjutnya, analisis menggunakan metode kualitatif dengan cara menginterpretasi hasil wawancara mendalam dengan menggunakan teknik interpretif. Data hasil observasi dinarasikan untuk melengkapi analisis data dan penulisan laporan. Penelitian ini da banyak keterbatasan karena informan yang tidak bersedia mnceritakan pengalaman karena merasa sedih dengan tindakan penggusuran atau penyingkiran yang dilakukan pemkot. Sementara dari aparat Satpol PP juga operasi yang mereka jalankan adalah bagian dari penegakan hukum (regulasi). Kontestasi antara pemkot dan kelompok marjinal kota dalam perebutan ruang trotoar untuk fungsi ekonomi dan politik selalu ada di kota besar.

Hasil dan Pembahasan

1. Marjinalisasi ruang dan perlawanan kelompok marjinal

Trotoar sebagai ruang publik yang diperdagangkan dan berhubungan dengan proses politik dan munculnya perdagangan informal. Problemanya adalah: (1) bagaimana Pemkot Surabaya memahami trotoar yang dimanfaatkan oleh PKL. Trotoar yang beralih fungsi sebagai area PKL sebagai indikasi dari lemahnya kapasitas pemerintah kota untuk mengatur PKL dan (2) bagaimana Pemkot Surabaya terlibat dalam proses sosial, ekonomi, dan budaya pemanfaatan trotoar? Kegiatan Pemkot Surabaya yang melakukan penertiban secara teratur untuk mensterilisasi pemanfaat ruang trotoar dari PKL.

Trotoar sebagai ruang publik adalah satu-satunya tempat terbuka bagi para masyarakat marjinal untuk menemukan sumberdaya yang mereka butuhkan untuk hidup. Apa yang kita lihat adalah modifikasi ruang perkotaan yang menempatkan trotoar sebagai kawasan pedestrian yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk berjalan kaki dengan aman dan nyaman. Tidak berarti PKL ini berdiam diri. Mereka juga menggunakan suatu bentuk kontrol atas penertiban ruang itu yang dilakukan oleh Satpol PP. Ini adalah poin penting dari perlawanan PKL terhadap kebijakan penertiban ruang publik.

Trotoar yang berada dalam kawasan dimana fasilitas umum pendidikan dan fasilitas kesehatan berada maka disitu ada praktik pengeawasan yang ketat dari pemerintah kota (Satpol PP) dan kadangkala dengan melibatkan pihak selain Satpol PP. trotoar yang ada di jalan utama, yaitu Jl. Tunjungan, Jl. Dr. Soetomo, Jl. Polisi Istimewa, Jl. Raya Darmo, tak ditemui PKL yang memafaatkan trotoar. Artinya, trotoar yang berada di kawasan elite, hampir tidak ditemui praktik pengendalian dan kontrol atas trotoar yang ketat. Karena itu, furniturisasi benar-benar sebagai asesoris kota dan trotoar tersebut. Berbeda dengan trotoar yang berada di luar jalan utama maka trotoar itu merupakan ruang komersialisasi dan tempat bergantung kehidupan beragam kelompok

marjinal kota. Furniturisasi berfungsi sebagai instrumen politik untuk mengontrol dan mengendalikan beragam kelompok marjinal kota, terutama PKL.

Ada proses marjinalisasi ruang bagi kelompok marjinal kota. Ruang bagi kelompok marjinal kota semakin surut. Mereka tidak leluasa untuk memanfaatkan ruang kota tanpa ijin dari pemerintah. Kecenderungan pencaplokan ruang trotoar oleh PKL dan kelompok marjinal kota karena mereka ingin menangkap konsumen yang besar. Bukan semata-mata mereka tidak mampu bersaing dengan ekonomi kota formal. Dengan maksud sebagai upaya mempercantik Kota Surabaya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) berupaya memperindah kawasan trotoar dengan gambar bola dunia. Bola dunia terbuat dari beton semen ini dipasang di sejumlah ruas trotoar, misalnya di sisi timur Jl Urip Sumoharjo, Jl. Gubernur Suryo, Jl, Walikota Mustajab, Jl, Rajawali, Jl Adiyawarman dan Jl Embong Malang dan trotoar di jalan lainya. Jarak antar bola sekitar 2-5 meter.

Menurut walikota Surabaya keberadaan bola dunia untuk mempercantik dan mengantisipasi adanya kecelakaan kendaraan yang masuk area trotoar. Karena jika diberi pagar kesannya tidak indah. Cukup banyak bola dunia sudah terpasang. Hal yang menarik dari bola-bola ini adalah merintang trotoar untuk tidak digunakan PKL. Ini merupakan bagian dari praktik politik spasial pemerintah kota dalam menghadapikelompok marjinal PKL (<https://news.detik.com/berita/3269256/bola-dunia-percantik-trotoar-dan-beri-rasa-aman-pejalan-kaki-di-surabaya>).

Dengan ruang yang semakin marjinal, PKL melakukan modifikasi pada lapak yang digunakan. Mereka menggunakan mobil atau memodifikasi kendaraan bermotor oda dua, becak, dan sepeda angin. Ini untuk memudahkan mereka untuk berpindah dan tidak tertangkap Satpol PP, TNI, kepolisian, yang melakukan penertiban dengan cara yang represif. Tumpukan gerobak yang semula disembunyikan di salah satu sudut kavling RSUD yang masih dalam proses pembangunan pun dikeluarkan dan dihancurkan dengan paksa. dan poisi yang terlibat dalam razia PKL.

Sejak tahun 2000an, pemkot Surabaya sudah membatasi PKL untuk menngunaka trotoar. DPRD Surabaya menyebutkan selama 2017 hingga awal 2018 komisinya kerap menerima aduan dari PKL Pacuan Kuda, pacar Keling, penjual degan Menur hingga PKL di Jalan Bongkaran. Sesuai Perda No. 10 tahun 1987 dan SK Walikota tahun 1999 bahwa PKL dilarang berjualan di trotoar dan taman-taman kota. Untuk itu mereka yang berjualan di tempat yang telah dilarang, tetap tidak diperkenankan berjualan di sana. Bahkan mulai 1 Februari, Pemkot Surabaya mencanangkan kembali penertiban pedagang kaki lima (PKL), termasuk wartel trotoar, pelacur, anak jalanan, gelandangan, pengemis, IMB, HO, izin reklame, KTP, tempat hiburan, panti pijat, dan bangunan liar di bantaran sungai. Surat edaran Walikota mengenai tanggal penetapan "penertiban" itu telah sampai di tangan para PKL sekitar Jl. Airlangga, Jl. Dharmawangsa, Jl. Dharmahusada, dan Jl. Karangmenjangan.

Furniturisasi ruang trotoar sebagai cara untuk menempatkan fungsi trotoar bagi pejalan kaki selain untuk keindahan ruang publik kota. Furniturisasi juga tidak berfungsi secara optimal, sehingga ada keterlibatan Satpol PP bahkan walikota turun tangan langsung untuk mensterilisasi trotoar. Kasatpol PP Surabaya mengatakan, pemasangan rambu itu meringankan tugas satpol PP. "Jika ada yang jualan, bisa langsung kami tertibkan. Sebenarnya Surabaya sudah punya aturan tegas terkait larangan berjualan di jalur pedestrian, yakni, Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Umum. Dalam aturan itu disebutkan tidak boleh parkir sembarangan, berjualan di jalur pedestrian, dan membuang sampah sembarangan (wawancara).

Secara sederhana kita bisa melihat pesatnya perubahan fungsi trotoar, yang semula sebagai rumah dari para tuna wisma, tempat mencari uang bagi pengemis, penjual surat kabar, tempat parkir sepeda dan sebagai lajur bagi pejalan kaki, dan lain-lain, kini berubah menjadi ruang yang eksklusif dan indah. Ada pergeseran fungsi dan eksistensi trotoar. Kini trotoar bukan sebagai area untuk aktivitas ekonomi dan kelangsungan hidup kelompok marjinal kota. Trotoar juga sudah tidak lagi menjadi sumberdaya ekonomi bagi PKL.

Persaingan antaraktor atas ruang publik adalah sumber ketegangan utama, karena melibatkan disposisi masing-masing para pemangku kepentingan dalam proses perubahan spasial. Disposisi lemah, seperti halnya dengan warga dari lingkungan yang kurang beruntung, jika tidak diperhitungkan dalam proses pembangunan, akan tercermin dalam ketegangan dan ledakan, sering dimainkan di depan umum spasi. Daripada kompetisi untuk penggunaan ruang publik, ini bisa menjadi persaingan untuk transformasi bagian-bagian, atau keseluruhan, area, dengan implikasi langsung untuk kondisi dan penggunaan publik. Daripada kompetisi untuk penggunaan ruang yang ada, ini adalah kompetisi untuk bentuk masa depan, untuk sifat dan karakteristik ruang publik yang memiliki signifikansi politik dengan kehidupan publik pada lokasi setempat.

2. Kontestasi antara pemkot dan PKL

Di Surabaya, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah mengeluarkan sejumlah peraturan daerah berurusan dengan keamanan kota. Ruang publik perkotaan selama dua dekade terakhir telah mengalami perubahan besar. Pusat kota, dianggap penting untuk kota baru neoliberal dan kewirausahaan agenda (Harvey 1989), tunduk pada strategi pemulihan ekonomi yang kompleks. Pembaharuan perkotaan dengan demikian menghasilkan warga yang diikutsertakan dan dikecualikan melalui penciptaan ruang publik yang mengecualikan kelompok sosial tertentu dari akses dan penggunaan penuh mereka. Secara khusus, proyek pembaruan perkotaan meminjam beberapa fitur khas dari pinggiran kota permukiman dan pusat perbelanjaan (Aurigi & Graham 1997).

Trotoar berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan Dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya bukan ruang publik biasa. Pemkot Surabaya sudah membuat regulasi tentang ruang publik trotoar bukan lagi tempat para PKL mencari nafkah untuk bertahan hidup di kota. Ruang-ruang trotoar berdasarkan Perda tersebut diisi oleh pemerintah kota dengan furnitur. Terlepas dari tujuan keindahan, yang terlihat di sepanjang sisi jalan utama, hampir semua trotoar di Surabaya sudah merupakan ruang yang didekorasi dan diisi dengan furnitur kota yang bagus dan indah.

Dengan rancangan trotoar seperti itu, maka sudah tidak memungkinkan lagi trotoar menjadi tempat tinggal bagi para tuna wisma, pengemis, PKL dan orang-orang marjinal kota lainnya. Tidak ada lagi toleransi bagi kaum marjinal kota untuk memanfaatkan trotoar untuk kepentingan di luar yang diatur oleh Perda itu. Beberapa trotoar yang ada di pusat kota dipasang papan putih bertuliskan warna merah yang bertuliskan itu dipasang "PKL Dilarang Berjualan di Trotoar". Pemasangan rambu oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya itu bertujuan untuk menghilangkan pedagang yang berjualan di jalur pedestrian. Fungsi trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki bukan untuk PKL, pengemis, maupun tuna wisma. Tidak hanya pemasangan rambu, tetapi ada asesoris berupa furnitur kota yang ditempatkan di area trotoar itu. Kawasan pedestrian yang sudah dilengkapi dengan furnitur kota dengan semua asesoris non furnitur berada di kawasan pedestrian Jalan

Tunjungan, Padegiling, Pemuda, Embong Malang, Rajawali, Panglima Sudirman, Basuki Rakhmad, Raya Darmo, HR. Muhamad, Dharmahasuda dan lainnya.

Konstruksi ruang trotoar di Surabaya adalah tindakan politik (termasuk ideologi kapitalis yang membenarkannya dari proyek furniturisasi itu). Pemerintah kota di Indonesia sudah menerbitkan kebijakan yang mendukung penggusuran atau penyingkiran PKL dari trotoar. Kontribusi PKL besar untuk kehidupan masyarakat perkotaan umumnya. Mereka sebagai sektor ekonomi informal memproduksi jasa layanan kepada sektor informal lainnya. Contoh: penjual nasi dan minuman melayani kebutuhan tukang becak, penjaga keamanan, tukang parkir, pekerja bangunan, buruh toko, buruh pabrik, dan masyarakat luas.

Kehadiran pemerintah kota di ruang trotoar sekarang tidak hanya hadir dalam papan pelarangan bagi PKL untuk tidak berjualan di trotoar, tetapi juga dalam kegiatan furniturisasi trotoar. Semua motif pelarangan dan pembatasan ruang ini bisa dibaca sebagai simbol dalam teks kekuasaan pemerintah kota, yang bekerja melalui aparat yang bertugas mengusir PKL dari ruang trotoar itu. Furniturisasi adalah produksi ruang yang tidak harus menjadi tindakan kekuasaan pemkot. Struktur spasial/ruang trotoar sudah berubah, tidak murni untuk pejalan kaki melainkan untuk barang-barang yang memiliki fungsi memperindah tetapi juga merusak keindahan. Contoh: keberadaan tiang-tiang listrik, rambu-rambu lalu lintas, bak sampah adalah perabotan yang merusak pemandangan trotoar. Menggunakan konsepsi Lefebvre, trotoar harus steril dari PKL karena trotoar merupakan ruang ideal yang merupakan konstruksi mental. Tetapi sebagai konstruksi mental maka ruang itu pasti mencerminkan proyek-proyek politik, sehingga keberadaan ruang trotoar mempengaruhi struktur sosial. Ketika ruang yang dikonstruksi itu ditertibkan maka yang terjadi kemudian adalah ketegangan antara mental dan dimensi ruang sosial dan praktik keruangan.

Ruang trotoar dikonstruksi sebagai unsur dari infrastruktur kota untuk pejalan kaki. Dalam perkembangan kota kontemporer, konstruksi trotoar dimodifikasi terus menerus sehingga ini menyebabkan konflik, ketegangan, ketakutan, ancaman antara yang mengkonstruksi, yang menegakkan regulasi, dan yang memanfaatkan ruang. Ini semua adalah cerminan dari fragmentasi sosial yang muncul dari penataan ruang publik perkotaan. Politik kooptasi yang berjalan melalui penerapan teknologi pengawasan yang digelar oleh Satpol PP dan perangkat keamanan lain berdampak pada penurunan daya politik kelompok masyarakat marjinal yang sebagian besar adalah kaum migran. Sementara itu, pemerintah kota dengan kuasa legalnya membuat kebijakan publik yang menyebabkan ketidakpastian dan pelemahan daya politik mereka. Setiap pemanfaatan ruang publik terutama trotoar maka disitulah kuasa penuh pemerintah kota ditampilkan melalui perangkat yang bernama Satpol PP.

Trotoar di Surabaya dimanfaatkan oleh kelompok marjinal untuk mengemis, berjualan surat kabar, kue, makanan, mainan, dan kebutuhan sehari-hari setiap orang. Pemanfaatan trotoar mengikuti banunan fasilitas sosial dan fasilitas publik yang ada. Di rumah sakit Dr. Soetomo, trotoar digunakan untuk berjualan semua kebutuhan pengguna jasa rumah sakit dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Peranan furnitur di trotoar dalam semua proyek desain ruang kota itu penting dan ini benar-benar mencerminkan teknologi pengawasan ruang publik. Furnitur itu memiliki peran fungsional, tetapi juga merupakan sarana untuk menyampaikan identitas. Saat ini, furnitur di tempat umum tunduk pada harapan tinggi dalam hal kualitas karena dianggap sebagai alat yang efektif untuk keindahan ruang publik kota. Furnitur yang ada di sepanjang jalan mengungkapkan keinginan untuk harmoni, heterogenitas dan keindahan.

Bangku-bangku yang diletakkan di kawasan pedestrian merupakan simbol perjuangan antara dua visi hidup kota dan ruang publiknya. Di satu sisi, sebuah kota hidup sebagai tempat transit dan bagianlainnya, kota sebagai tempat pertukaran dan interaksi. Di sisi yang lain, ruang publik sebagai ruang yang terencana, terkendali, tertib dan aman saat ada totonan di kota seperti festival atau karnaval. Di sisi lain, ruang publik sebagai tempat interaksi bebas, di mana paksaan/pengawasan oleh institusi yang kuat tidak ada dan di mana risiko gangguan dan ketidakpastian ditoleransi. Bangku yang ada di trotoar, dipahami dan dirancang dengan sengaja sebagai pendukung sementara untuk kenyamanan atau untuk tempat beristirahat, seperti bangku yang ada di ruang publik umumnya yang dimuati dengan nilai-nilai kesopanan, keteraturan, dan keindahan.

Ada berbagai jenis furnitur anti kelompok marjinal. Furnitur perkotaan sekarang dirancang untuk dukungan sementara saja, tidak ada yang bisa duduk dengan nyaman untuk waktu yang lama, berbaring atau peregangan. Dalam hal ini, elemen penting muncul. Kursi tunggal atau kursi yang panjang dan bisa diduduki oleh dua sampai tigaorang banyak ditemui di trotoar. Kehadiran kursi-kursi di kawasan pedestrian itu tidak hanya menghalangi penggunaan mereka sebagai tempat tidur, tetapi bangku-bangku itu mengubah seluruh sifat bangku publik dari tempat pertukaran sosial dan relaksasi ke penggunaan individu sesaat untuk melepas penat. Ini adalah suatu perubahan kecil pada trotoar yang tanpa diasadari oleh warga biasa. Ada kecenderungan ketidakpahaman warga atas asesoris atau furnitur trotoar memberi efek kuat pada sirkuit kelangsungan hidup yaitu PKL.

Furniturisasi trotoar adalah bentuk nyata kontestasi antara pemkot dan kelompok marjinal kota/PKL. Kontestasi itu bagi pemkot untuk mencegah pencaplokan trotoar dari kelompok marjinal kota. Cara yang dilakukan Pemerintah Surabaya adalah melakukan intervensi melalui regulasi kebijakan (Perda) yang mengatur dan membatasi kegiatan kelompok marjinal di trotoar. Ruang-ruang trotoar dilebarkan, dibersihkan dan dihijaukan dan diisi dengan furnitur yang beragam sesuai dengan kondisi jalan. hasil studi ini menyimpulkan bahwa pemerintah Kota Surabaya sudah mengatur dan membentengi trotoar dan itu berarti membentengi kota. Trotoar diisi dengan furnitur yang berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan ruang publik, seperti bangku untuk duduk, rambu lalu lintas, kotak pos, kotak telepon, tiang lampu, atau sinyal lalu lintas, pemberhentian bus, pot-pot bunga/tanaman, pohon, tempat sampah dan lain sebagainya. Kesimpulan studi ini adalah trotoar berada dalam kontestasi dan regulasi. Trotoar memainkan kehidupan kaum urban. Kontrol masyarakat/publik terhadap ruang publik yang bernama trotoar itu penting dan perlu negosiasi dari multiaktor (pemerintah, masyarakat, dan swasta). Kota masa kini dan masa depan lebih relevan jika dibangun dengan memperhatikan aspek keadilan. Kota dengan ruang-publik yang ada bisa dimanfaatkan untuk semua kelompok masyarakat.

Kontestasi antara pemkot dan PKL dapat ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan PKL terhadap pendekatan pemerintahan perkotaan yang mengadopsi gaya pembangunan neoliberal yang memprioritaskan investasi swasta atas konsumsi publik atas ruang publik. Ini menyiratkan bahwa hubungan antara PKL yang bekerja di ruang publik untuk mencari nafkah bermakna kontestatif. Ini seakan-akan, Satpol PP, polisi, aparat penegak hukum menempatkan PKL sebagai objek dari kekuasaan dan bagian dari praktik ruang untuk penegakan regulasi (Perda No.9 tahun 2014). Jadi ada semacam kekaburan dari dinamika kontestasi ini. Dibalik kontestasi itu juga ditemukan ada praktik informal dari para penegak ketertiban dan norma tertulis, karena PKL juga mengambil manfaat simbolis saat berinteraksi dengan Satpol PP. Para PKL mendapat bocoran informasi tentang waktu razia, sehingga ruang trotoar sudah sepi dari PKL. Ini adalah kesepakatan informal dari sisi lain kontestasi pemkot dan PKL.

Renegosiasi antara pemkot dan kelompok marjinal kota bisa mengurangi tingkat kekerasan politik dibalik praktik penggusuran dan relokasi (pengalihan pedagang kaki lima ke area pinggiran yang jauh dari publik). Ada problem yang jauh lebih kompleks dari praktik penggusuran PKL yang memanfaatkan trotoar di area yang bukan jalan utama (protokol). Kontrol dari pemkot pada trotoar-trotoar di pusat kota benar-benar tidak ada toleransi kepada PKL. Ini merupakan suatu hasil interaksi yang simbiosis mutualistik antara pemkot dan PKL yang memiliki pemahaman baik terhadap ruang-ruang trotoar yang tidak diperuntukkan bagi PKL. Dengan demikian, kontestasi atas ruang publik trotoar adalah dinamika dari pembangunan kota neoliberal yang berada dalam kontestasi antara inklusivitas dan eksklusivitas.

Kesimpulan

Trotoar adalah ruang public yang ada di area perkotaan dan memiliki fungsi strategis dari aspek sosialm ekonomi, politik, dan kultural. Ruang public trotoar menjadi ruang untuk symbol keindahan kota. Bukan ruang untuk tempat aktualisasi PKL. Trotoar bukan ruang ekonomi, tetapi ruang politik. Sehingga menyebabkan ruang itu penuh dengan control politik. Kontrol politik yang diperuntukkan bagi pemanfaat gratis seperti PKL. Pembangunan ruang publik kota perlu memperhatikan aspek inklusivitas, sehingga pembatasan pemanfaatan ruang itu bagi kelompok marjinal kota tidak berkesan represif dan tidak manusiawi.

Kota inklusif tidak dibangun atas dasar kontrol ketat atau pengendalian ruang publik trotoar. Ruang publik trotoar adalah ruang untuk pejalan kaki yang menjamin keamanan dan kenyamanan. Ruang trotoar bukan ruang untuk meletakkan furnitur, karena furniture yang ada di trotoar membuat pejalankaki tidak nyaman dan aman.

Pengaturan ruang publik trotoar oleh pemerintah adalah pengaturan spasial, pengaturan yang selalu menimbulkan ketegangan antara yang diatur dan mengatur. Banyak sekali ruang-ruang publik yang dibangun oleh investor dalam bentuk mal/plasa dan ruang-ruang terbuka lain yang dapat diakses oleh publik. Sementara kelompok marjinal kota tidak bisa berinvestasi untuk memproduksi ruang ekonomi sendiri, kecuali memanfaatkan ruang publik di sepanjang jalan yang ada di kota. Itupun sudah tidak dapat diakses untuk kelangsungan hidup.

Saran kebijakan dari prolematika kontestasi antara pemerintah lokal dan kelompok marjinal kota ada dua. Pertama, penggunaan ruang publik untuk kegiatan mata pencaharian kelompok marjinal kota perlu dirancang kembali. Dalam konteks ini, pejabat lokal (elite pemerintah lokal) yang memiliki kuasa seyogianya memberikan titik tekan pada praktik tata kelola sektor informal yang memungkinkan kebijakan yang dihasilkan tidak merusak kegiatan PKL/kelompok marjinal kota yang mengandalkan ruang publik trotoar untuk kelangsungan hidupnya/penghidupannya. Kedua, proses penyusunan kebijakan yang mengatur posisi PKL di ruang publik termasuk trotoar perlu mendudukan dan mengajak perwakilan organisasi PKL dalam proses penyusunan kebijakan itu. Ini untuk menghasilkan keseimbangan antara regulasi dan perlindungan terhadap kelompok marjinal kota untuk tidak teresklusi dari ruang publik dengan dengan pendekatan yang berpijak pada konsep pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini akan dapat mengurangi praktik pendekatan ketat yang bertumpu pada peraturan atau hukuman yang merugikan dan menyingkirkan kelompok marjinal kota tersebut.

Daftar Pustaka

- Banerjee, Tridib. 2001. The future of public space: Beyond invented streets and reinvented places, *Journal of the American Planning Association*, Vol. 67, 1, Chicago. Dalam <https://is.muni.cz/el/1423/jaro2016/SOC584/.../Banerjee.pdf>, diunduh 3 Januari 2018.
- Bergamaschi, Maurizio., Marco Castrignanò, Marco., and Pia De Rubertis. 2014. The homeless and public space: urban policy and exclusion in Bologna. *Revue Interventions économiques*, papers in Political Economy, 51. Dalam URL: <http://interventionseconomiques.revues.org/2441>, diunduh 5 Januari 2018.
- Carr, Stephen., Francis, Mark., Rivlin, Leanne G. Rivlin., Stone, Andrew M. 1992. UK: Cambridge University Press.
- Dan Locton, J. 2011. Architecture, urbanism, design and behaviour: a brief review 12 September. Dalam <https://www.researchgate.net/publication/260752108>, diunduh 2 Februari 2018.
- Doherty, J., et al. 2006. The changing role of the state: homelessness and exclusion: regulating public space, *Transnational Report*, Working Group 1, European Observatory on Homelessness.
- Given, Lisa M (ed.). 2008. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, Vol.1 & 2, California: Sage Pub.
- Graham, S., & Aurigi, A. 1997. Virtual Cities, Social Polarization, and the Crisis in Urban Public Space. *The Journal of Urban Technology*, 4, 19-52. <http://dx.doi.org/10.1080/10630739708724546>, diunduh 6 Februari 2018.
- Harvey, David.1989. *The Urban Experience*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Kruijt, Dirk and Koonings, Kees (eds.).2009. *Megacities: the politics of urban exclusion and violence in the global south*. London: Zed Books Ltd. Dalam [http://dl.lux.bookfi.net/genesis/404000/8228cecc5a027e1c708aed87fae9f4b2/_as/\[Kees_Koonings,_Dirk_Kruijt\]_Megacities_The_Polit\(BookFi\).pdf](http://dl.lux.bookfi.net/genesis/404000/8228cecc5a027e1c708aed87fae9f4b2/_as/[Kees_Koonings,_Dirk_Kruijt]_Megacities_The_Polit(BookFi).pdf), diunduh 7 Mei 2018.
- Lefebvre, Henri. 1991. *The Production of Space*. Trans. by Donald Nicholson-Smith. Cambridge, MA: Blackwell.
- Lefebvre H., 1996: Writings on cities dalam Kofman E. and Lebas E. (eds). Oxford: Blackwell Pub.
- Low, Setha & Smith, Neil (eds.).2006.*The Politics of Public Space*. 1st edition. NewYork: Routledge.
- Nagati, Omar & Stryker, Beth. 2016. Street Vendors and the Contestation of Public Space, Spanyol: Cluster. Dalam <http://www.wiego.org/publications/street-vendors-and-contestation-public-space>, diunduh 4 februari 2018.
- Peraturan Daerah No.9 Tahun 2014tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan Dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya.
- Recio, Redento Bolivar & Gomez, José Edgardo A. 2013. Street Vendors, their Contested Spaces, and the Policy Environment: A View from Caloócan, Metro Manila, *in Environment and Urbanization ASIA* 4(1):173-190. March. Dalam https://www.researchgate.net/publication/258136765_Street_Vendors_their_Contested_Spaces_and_the_Policy_Environment_A_View_from_Caloocan_Metro_Manila. DOI: 10.1177/0975425313477760, diunduh 4 Februari 2018.

UNFPA, World population trends. Dalam <https://www.unfpa.org/world-population-trends>.
Diunduh 3 Januari 2018.

Van Deusen Jr, Richard. 2002. Public space design as class warfare: Urban design, the 'right to the city' and the production of Clinton Square, Syracuse, NY Author(s): *GeoJournal*, Vol. 58, No. 2/3, Social Transformation, Citizenship, and the Right to the City (2002), pp. 149-158.
Dalam URL: <https://www.jstor.org/stable/41147761>, diunduh 6 Februari 2018.

Lampiran 1:

Gambar tentang beberapa area trotoar di Surabaya yang lengkap dengan berbagai furnitur jalan



PANEL 1

